



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK KURNIAWAN
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 405582

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.557.306.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.843.830.000
2. Tanah Seluas 347 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 179.061.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/95 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 138.415.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 256.000.000
5. Tanah Seluas 7000 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 435.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 241.900.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. 5.813.569.537**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.389.765.280**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 13.437.540.817



III. HUTANG

Rp. 1.845.934.933

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.591.605.884

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.